

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Palembang	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
2	Kota Palembang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai
3	Kota Palembang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	√	Selesai
4	Kota Palembang	Pajak Daerah	-	√	Selesai
5	Kabupaten Pringsewu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
6	Kabupaten Sarolangun	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
7	Kabupaten Bangka	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
8	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
9	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
10	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Pajak Daerah	-	√	Selesai
11	Kabupaten Mandailing Natal	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
12	Kabupaten Mandailing Natal	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
13	Kabupaten Bima	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	-	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-789/PK/2017 tanggal 4 Desember 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Pariaman	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
2	Kabupaten Bungo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan	-	√	Selesai
3	Kabupaten Bangka Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
4	Kabupaten Batu Bara	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kabupaten Karimun	Pajak Daerah	-	√	Selesai
6	Kabupaten Jenepono	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
7	Kabupaten Bolaang Mongondow	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	-	√	Selesai
8	Kabupaten Bombana	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	Tidak diproses *)
9	Kabupaten Bombana	Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	Tidak diproses *)
10	Kabupaten Bombana	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	Tidak diproses *)

Keterangan

*) Tidak diproses karena *softcopy/hardcopy* tidak disampaikan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Jawa Barat	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
2	Provinsi Bali	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Provinsi Bali	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kota Mataram	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame	-	√	Selesai
5	Kota Mataram	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
6	Kota Mataram	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
7	Kota Mataram	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
8	Kota Mataram	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
9	Kota Mataram	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	-	√	Selesai
10	Kota Mataram	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai
11	Kota Mataram	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet	-	√	Selesai
12	Kota Mataram	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kota Mataram	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
14	Kabupaten Buleleng	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
15	Kabupaten Buleleng	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
16	Kabupaten Buleleng	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	√	Selesai
17	Kabupaten Tabanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
18	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
19	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
20	Kabupaten Tabanan	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
21	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
22	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
23	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi terminal	-	√	Selesai
24	Kabupaten Fakfak	Pajak Daerah	-	√	Selesai
25	Kabupaten Yahukimo	Pajak Daerah	-	√	Selesai
26	Kabupaten Yahukimo	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
27	Kabupaten Yahukimo	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
28	Kabupaten Yahukimo	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Sumatera Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
2	Kota Cimahi	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	-	Tidak diproses *)
3	Kabupaten Pakpak Bharat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kabupaten Aceh Barat	Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kabupaten Aceh Barat	Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kabupaten Kotawaringin Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-165/PK/2018 tanggal 23 Maret 2018
7	Kabupaten Pati	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

Keterangan

*) Tidak diproses karena *softcopy/hardcopy* tidak disampaikan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Bandar Lampung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
2	Kota Pekalongan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
6	Kabupaten Mesuji	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kabupaten Mesuji	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
8	Kabupaten Kampar	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
9	Kabupaten Kampar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
10	Kabupaten Kampar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
11	Kabupaten Tanah Laut	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
12	Kabupaten Tanah Laut	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kabupaten Tanah Laut	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	-	√	Selesai
14	Kabupaten Cirebon	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
15	Kabupaten Jepara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
16	Kabupaten Sleman	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
17	Kabupaten Sleman	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	√	Selesai
18	Kabupaten Sleman	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Bangka Belitung	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kota Sukabumi	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kabupaten Simeulue	Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai
4	Kabupaten Tapanuli Utara	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
5	Kabupaten Tana Toraja	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
6	Kabupaten Bandung	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kabupaten Sukabumi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	√	Selesai
8	Kabupaten Tasikmalaya	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
9	Kabupaten Tegal	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
10	Kabupaten Badung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
11	Kabupaten Badung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda		
			Hardcopy	Softcopy	
12	Kabupaten Badung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
13	Kabupaten Badung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
14	Kabupaten Tabanan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
15	Kabupaten Tambarauw	Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
16	Kota Pariaman	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	-	-	Tidak diproses *)
17	Kota Padang Panjang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	-	Tidak diproses *)
18	Kota Sungai Penuh	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	Tidak diproses *)
19	Kabupaten Nias Selatan	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	-	-	Tidak diproses *)
20	Kabupaten Nias Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	-	Tidak diproses *)
21	Kabupaten Nias Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	Tidak diproses *)
22	Kabupaten Labuhanbatu	Retribusi Tempat Parkir Khusus dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-153/PK/2018 tanggal 16 Maret 2018
23	Kabupaten Tasikmalaya	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	Tidak diproses *)
24	Kabupaten Kaimana	Pajak Daerah	-	-	Tidak diproses *)

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
25	Kabupaten Kaimana	Retribusi Jasa Umum	-	-	Tidak diproses *)
26	Kabupaten Kaimana	Retribusi Jasa Usaha	-	-	Tidak diproses *)
27	Kabupaten Kaimana	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	Tidak diproses *)

Keterangan

*) Tidak diproses karena softcopy/hardcopy tidak disampaikan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Bekasi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai
2	Kota Bekasi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kabupaten Ketapang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
4	Kabupaten Kotawaringin Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kabupaten Bulungan	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah	-	√	Selesai

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Sumatera Utara	Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Provinsi Sumatera Utara	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
3	Provinsi Sulawesi Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kota Lhokseumawe	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
5	Kota Lhokseumawe	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
6	Kota Lhokseumawe	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame	-	√	Selesai
7	Kota Lhokseumawe	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
8	Kota Lhokseumawe	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
9	Kota Lhokseumawe	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
10	Kota Sabang	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
11	Kota Sabang	Retribusi Izin Trayek	-	√	Selesai
12	Kota Makassar	Pajak Daerah	-	√	Selesai
13	Kabupaten Aceh Jaya	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
14	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
16	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
17	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
18	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
19	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
20	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
21	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
24	Kabupaten Belitung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
25	Kabupaten Belitung	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
26	Kabupaten Belitung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
27	Kabupaten Belitung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda		
			Hardcopy	Softcopy	
28	Kabupaten Tojo Una-Una	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
29	Kabupaten Tojo Una-Una	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai
30	Kabupaten Sukabumi	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
31	Kabupaten Sukabumi	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
32	Kabupaten Pangandaran	Pajak Parkir	-	√	Selesai
33	Kabupaten Pangandaran	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
34	Kabupaten Nganjuk	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
35	Kabupaten Nganjuk	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
36	Kabupaten Nganjuk	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
37	Kabupaten Jombang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
38	Kabupaten Magetan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
39	Kabupaten Probolinggo	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo	-	√	Selesai
40	Kabupaten Probolinggo	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
41	Kota Padang Panjang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	-	Tidak diproses *)
42	Kota Bukittinggi	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	Tidak diproses *)

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
43	Kabupaten Enrekang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	-	Tidak diproses *)
44	Kabupaten Enrekang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	-	Tidak diproses *)
45	Kabupaten Sigi	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	Tidak diproses *)
46	Kabupaten Buol	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	Tidak diproses *)
47	Kabupaten Bolaang Mongondow	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	-	-	Tidak diproses *)
48	Kabupaten Minahasa Utara	Retribusi Daerah	-	-	Tidak diproses *)
49	Kabupaten Trenggalek	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	Tidak diproses *)
50	Kabupaten Trenggalek	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal	-	-	Tidak diproses *)
51	Kota Bitung	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	-	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-48/PK/2018 tanggal 2 Februari 2018
52	Kota Bitung	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	-	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-48/PK/2018 tanggal 2 Februari 2018
53	Kabupaten Jeneponto	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	-	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-48/PK/2018 tanggal 2 Februari 2018

Keterangan :

*) Tidak diproses karena *softcopy/hardcopy* tidak disampaikan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Sungai Penuh	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
2	Kota Sungai Penuh	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
3	Kota Sungai Penuh	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	Tidak diproses *)
4	Kota Banjarbaru	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
5	Kota Banjarbaru	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	√	Selesai
6	Kabupaten Batu Bara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
7	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	Tidak diproses *)
8	Kabupaten Labuhanbatu	Retribusi Tempat Parkir Khusus dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
9	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	√	Selesai
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
14	Kabupaten Boyolali	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
15	Kabupaten Boyolali	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
16	Kabupaten Boyolali	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

Keterangan

*) Tidak diproses karena softcopy/hardcopy tidak disampaikan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Kalimantan Selatan	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kota Banjarmasin	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
3	Kota Banjarmasin	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
4	Kabupaten Kutai Timur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
5	Kabupaten Kutai Timur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
6	Kabupaten Kutai Timur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kabupaten Mahakam Ulu	Retribusi Daerah	-	√	Selesai
8	Kabupaten Kotabaru	Pajak Daerah	-	√	Selesai
9	Kabupaten Kotabaru	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
10	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	-	√	Selesai
11	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-102/PK/2018
Tanggal : 26 Februari 2018

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Cianjur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
2	Kabupaten Batang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kabupaten Temanggung	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
2	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
3	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
4	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	-	√	Selesai
5	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai
6	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
7	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
8	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
9	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
10	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
11	Kabupaten Gianyar	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	-	√	Selesai
12	Kabupaten Sumba Timur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kabupaten Belu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai
2	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	-	√	Selesai
3	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
4	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
5	Kabupaten Tabanan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
6	Kabupaten Tabanan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
7	Kabupaten Klungkung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
8	Kabupaten Klungkung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
9	Kabupaten Klungkung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	√	Selesai
10	Kabupaten Klungkung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
11	Kabupaten Manggarai	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
12	Kabupaten Ngada	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda		
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kabupaten Nagekeo	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
14	Kabupaten Nagekeo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	√	Selesai
15	Kabupaten Nagekeo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
16	Kabupaten Flores Timur	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
17	Kabupaten Flores Timur	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
18	Kabupaten Lembata	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
19	Kabupaten Lembata	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
20	Kabupaten Lembata	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Bogor	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kota Bogor	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
3	Kota Pekalongan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
4	Kota Pekalongan	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
5	Kota Tanjungpinang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
6	Kota Tanjungpinang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
7	Kota Dumai	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	√	Selesai
8	Kota Bitung	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
9	Kota Bitung	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
10	Kabupaten Pasaman Barat	Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
11	Kabupaten Dharmasraya	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
12	Kabupaten Labuhanbatu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum	-	√	Selesai
14	Kabupaten Toba Samosir	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
15	Kabupaten Toba Samosir	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
16	Kabupaten Toba Samosir	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan	-	√	Selesai
17	Kabupaten Toba Samosir	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
18	Kabupaten Jeneponto	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
19	Kabupaten Luwu Timur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
20	Kabupaten Luwu Timur	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
21	Kabupaten Bolaang Mongondow	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	Tidak diproses *)
22	Kabupaten Sumedang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
23	Kabupaten Klaten	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
24	Kabupaten Kendal	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
25	Kabupaten Kendal	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
26	Kabupaten Kendal	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Kendal	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
 Nomor : S- 1 /PK/2018
 Tanggal 2 Januari 2018

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Nusa Tenggara Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek	-	√	Selesai
2	Prov. Nusa Tenggara Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Prov. Nusa Tenggara Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kabupate Sumbawa	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
5	Kabupate Sumbawa	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
6	Kabupate Sumbawa	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
7	Kabupaten Sumbawa Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
8	Kabupaten Sumbawa Barat	Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut Lokal	-	√	Selesai
9	Kabupaten Sumbawa Barat	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
10	Kabupaten Sumbawa Barat	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	-	-	Tidak diproses *)
11	Kabupaten Nabire	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
12	Kabupaten Nabire	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kabupaten Nabire	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

Keterangan

*) Tidak diproses karena softcopy/hardcopy tidak disampaikan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 14 /PK/2018
Tanggal 15 Januari 2018

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Sintang	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
2	Kabupaten Melawi	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
3	Kabupaten Kutai Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
4	Kabupaten Kutai Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
5	Kabupaten Barito Kuala	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kabupaten Tabalong	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	√	Selesai
7	Kabupaten Tabalong	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai

Keterangan

*) Tidak diproses karena softcopy/hardcopy tidak disampaikan